



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

Bangka Pos

Babel Pos

Babel News

Radar Bangka

Rakyat Pos

Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rp18,14 M Aset Pemprov Raib

- Penyerahan LHP Tidak Tertib
- Gubernur Bentuk Tim Investigasi

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali belum berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satu sebabnya, aset-aset Pemprov Babel senilai Rp18,14 miliar tidak diketahui keberadaannya. Pemprov hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diserahkan Kamis (20/7/2017) di DPRD Babel.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun menyebutkan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemprov Babel tahun 2016 lalu, ● ke Hal 11 Kol 1



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				✓											

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓																							

Rp18,14 M Aset Pemprov Raib,

BPK masih menemukan beberapa hal yang menjadi pengecualian dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Babel.

"Terdapat aset lainnya berupa aset tetap yang tak diketahui nilai Rp18,4 M, yang sampai saat ini secara signifikan belum ditindaklanjuti oleh Pemprov Babel," ujarnya.

Temuan menahun ini, menurut Isma merupakan temuan yang sama di tahun 2015 lalu, meskipun tahun ini tidak ditemukan adanya kerugian negara. Namun ia berharap Pemprov dapat menindaklanjuti beberapa temuan yang menjadi catatan BPK.

Selain itu, BPK juga masih melihat adanya akumulasi aset tetap gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya. Ada juga pengelolaan retribusi pendapatan yang belum sesuai, dan akumulasi penyusutan aset tetap yang belum dilaksanakan.

Ia juga menyoroti, dalam penyampaian laporan keuangan ini, Pemprov Babel tidak tertib, karena melebihi tanggal 31 Maret 2017.

"Kami juga menemukan ma-

salah lain yang perlu diperhatikan, penatausahaan aset oleh Pemkab kepada Pemprov belum tertib, dan kekurangan volume pembangunan fisik baik gedung maupun jalan, kemudian penyusunan laporan keuangan Pemprov tahun ini tidak terib, disusun dan dilaporkan melebihi 31 Maret 2017," tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskannya, setelah LHP ini diserahkan, Pemprov Babel bersama OPD wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan yang ada, dan memberikan jawaban penjelasan ke BPK tentang tindak-lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan selambatnya 60 hari setelah pemeriksaan keluar.

"Gubernur mengatakan akan membentuk task force menindaklanjuti ini, saya berharap dengan beberapa hal ini bisa berikan hasil lebih baik sehingga utk tahun ini (2017), lebih baik," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan tidak menginginkan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan di tahun depan. Dia menegaskan semua OPD harus bekerja

secara profesional dan sesuai aturan, bahkan dirinya menyebutkan akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri aset yang hilang ini.

"Sudah ada yang diperbaiki, seperti kendaraan dewan itukan sudah kita bicarakan dan selanjutnya menyusun bagaimana keluarannya," tukasnya.

Untuk aset yang hilang, Erzaldi menugaskan tim investigasi yang diketuai oleh Zaidan untuk menelusuri kemana aset yang hilang ini. Karena dirinya tak ingin menghapuskan aset namun ternyata nantinya diketahui aset ini dimiliki pihak lain.

"Dalam satu dua bulan ini harus ada hasil dari tim investigasi, laporkan ke saya, dan nanti saya ambil kebijakan," tegasnya.

Mengenai sistem keuangan, dirinya menyebutkan Pemprov sudah menerapkan sistem keuangan yang berbasis akual, melalui simda (sistem keuangan daerah).

"Jadi sebetulnya tim sudah bagus, dan tahun depan saya minta BPK masuk pertama sekali, pada 15 Januari sudah masuk, saya tidak mau terlambat," tutupnya.

Sedangkan, Ketua DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, mengakui fungsi pengawasan lembaga yang dikomandoinya lemah. Pasalnya, aset-aset lainnya milik Pemprov Babel sebesar Rp18,1 miliar tidak diketahui keberadaannya dan alhasil Pemprov Babel hanya mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang diserahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI perwakilan Babel, di ruang sidang paripurna DPRD Babel, Kamis (20/7/2017).

"DPRD akan melaksanakan pembahasan melalui Panja (panitia kerja) untuk waktu kurang dari 60 hari dan akan berkoordinasi dengan BPK RI Bangka Belitung. Iya, temuan aset Rp18 miliar ini kemana? Dewan harus lebih jeli, pengawasan internal akan lebih kuat kedalam daerah. Ini bukan hanya kesalahan eksekutif saja, DPRD juga sebagai fungsi pengawasan tidak berjalan," akuinya.

Laporan yang disampaikan BPK kemarin lanjut Didit, merupakan peringatan bagi Pemprov Babel.

"Kalau terulang lagi, artinya kita tidak merespon temuan BPK ini," pungkasnya.

(nov/ron/1)